

**PRAKTIK KINERJA POLRI PASCA PEMISAHAN KELEMBAGAAN  
DENGAN TNI BERDASARKAN TAP MPR NOMOR 06 TAHUN 2000  
TENTANG PEMISAHAN TNI DAN POLRI**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**AGUS TAMBA**

**NPM : 1207350108**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2018**

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

AGUS TAMBA  
NPM : 1207350108

Judul :

**PRAKTIK KINERJA POLRI PASCA PEMISAHAN KELEMBAGAAN  
DENGAN TNI BERDASARKAN TAP MPR NOMOR 06 TAHUN 2000  
TENTANG PEMISAHAN TNI DAN POLRI**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan/dipertahankan

Jakarta,           Maret 2018

Pembimbing

**Gunawan Nachrawi, SH, MH.**

## **Lembar Pengesahan Penguji Dari Kampus**

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PRAKTIK KINERJA POLRI PASCA PEMISAHAN KELEMBAGAAN  
DENGAN TNI BERDASARKAN TAP MPR NOMOR 06 TAHUN 2000  
TENTANG PEMISAHAN TNI DAN POLRI**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan  
Tanggung jawab moral penulis

Jakarta,      Maret 2018

6000,-

AGUS TAMBA

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas Penulis ucapkan kepada Tuhan YANG MAHA ESA, yang karena bimbingannya maka Penulis bisa menyelesaikan sebuah skripsi berjudul “Praktik Kinerja Polri Pasca Pemisahan Kelembagaan Dengan Tni Berdasarkan Tap Mpr Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tni Dan Polri” Skripsi ini dibuat dengan berbagai observasi dalam jangka waktu tertentu. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu saya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyusunan skripsi ini. Saya menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar pada skripsi ini. Oleh karena itu saya mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini. Terima kasih , dan semoga skripsi ini bisa memberikan sumbangsih Positif bagi kita semua.

Jakarta,

AGUS TAMBA

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Praktik Kinerja Polri Pasca Pemisahan Kelembagaan Dengan Tni Berdasarkan Tap MPR Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tni dan Polri  
Nama : Agus Tamba  
NPM : 1207350108

Penelitian ini berjudul : Praktik Kinerja Polri Pasca Pemisahan Kelembagaan Dengan Tni Berdasarkan Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tni dan Polri. Yang menjadi permasalahan hukum adalah Bagaimana kedudukan dan fungsi kepolisian dalam struktur organisasi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ? Apakah yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi kepolisian dalam struktur organisasi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana terkemuka, dan seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu metode yang menganalisis mengenai Peraturan Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang dilakukan secara sistematis. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia melakukan perubahan paradigma kepolisian dengan memantapkan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional. Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Ditekankan pada fungsi pemerintahan, di mana Kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi Kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang Kepolisian, baik tugas dan wewenang prefentif maupun represif.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Pemikiran .....	6
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

A. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	17
B. Pengertian dan Peranan Kepolisian .....	23

### **BAB III : KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

A. Kedudukan Kepolisian Indonesia .....	37
B. Susunan Kelembagaan Kepolisian Indonesia .....	38

### **BAB IV : FUNGSI KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02**

**TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN TAP MPR NOMOR 06 TAHUN 2000  
TENTANG PEMISAHAN TNI DAN POLRI**

A. Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara .....	55
B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian .....	61
C. Pengawasan Kepolisian Nasional .....	72

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**